KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

OAGTZNSE

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 1 9 4			н.4 Х	Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			Н.5	Tidak Final	
A IDENITITAG DENERUMA DENGUAGUAN YANG DIDOTONG							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 3 4 4 8 1 6 9 3 9 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : DINI ADRIYANTI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-0	1	14.355.000	14.355.000	0	5	717.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 уууу							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah	DIMALI DALIZI III DALIZIA DALIZIA DI DALIZIA D						
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal		0 4 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan	:	RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan batandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	ı benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	r mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	